













Pendekatan konflik terhadap stratifikasi dapat diturunkan menjadi tiga prinsip, pertama, Collins yakin bahwa orang hidup dalam dunia subjektif yang dibangun sendiri. Kedua, orang lain mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengontrol pengalaman subjektif seorang individu, ketiga, orang lain sering mencoba mengontrol orang yang menentang mereka. Akibatnya adalah kemungkinan terjadinya konflik antar individu.

Collins mengembangkan serangkaian proposisi mengenai hubungan antara konflik dan beberapa aspek khusus kehidupan sosial:

1. Pengalaman memberikan dan menerima perintah adalah faktor yang menentukan pandangan dan tindakan individu
2. Makin sering orang memberikan perintah, dia akan makin bangga, semakin percaya diri, makin formal dan makin mengidentifikasi dirinya dengan cita-cita organisasi
3. Makin sering orang menerima perintah, maka ia makin patuh, makin fatalistis, makin terasing dari cita-cita organisasi, makin menyesuaikan diri secara eksternal, makin mencurigai orang lain, makin memikirkan imbalan ekstrinstik.

Collins mengembangkan lima prinsip analisis konflik yang diterapkan terhadap stratifikasi sosial, meski ia yakin bahwa kelima prinsip itu dapat diterapkan di setiap bidang kehidupan sosial.

*Pertama*, Collins yakin bahwa teori konflik harus memusatkan perhatian pada kehidupan nyata ketimbang pada







mendudukan seseorang di dalam posisi sosial tertentu. Dasar adanya pelapisan masyarakat adalah :

1. Tidak ada keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban
2. Tidak ada keseimbangan kewajiban dan tanggung jawab
3. Tidak ada keseimbangan dalam nilai-nilai sosial dan kurang terpenuhinya kebutuhan manusia.
4. Tidak ada keseimbangan dalam kekuatan sosial dan pengaruhnya diantara anggota-anggota masyarakat.

Terjadinya lapisan – lapisan dalam masyarakat menurut Wiliams bahwa proses-proses terjadinya lapisan dalam masyarakat itu pada dasarnya dapat diteliti dengan pedoman pada sistem stratifikasi sosial yang dapat di analisa berdasarkan unsur-unsur:

1. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif misalnya penghasilan, kekayaan dan wewenang.
2. Sistem pertangaan yang diciptakan oleh warga – warga masyarakat (prestise/gengsi dan penghargaan).
3. Lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan dan keanggotaan pada suatu organisasi.
4. Mudah dan sukarnya bertukar kedudukan.
5. Solidaritas diantara individu-individu maupun kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. (







sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan baru ada jika ada sebuah kedudukan. Seperti yang telah disebutkan bahwa peranan merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Jika seseorang melakukan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kewajibannya, berarti orang tersebut menjalankan peranannya. Dengan kata lain, peran seseorang itu tergantung pada kedudukan yang dimilikinya. Perbedaan antara kedudukan dan peranan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang secara praktis tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan dan sebaliknya tidak ada kedudukan yang tidak ada sebuah peranan. Dalam suatu pengertian, kedudukan dan peranan adalah dua aspek dari fenomena yang sama. Oleh karena itu jika ada *status konflik* (konflik kedudukan) maka ada *juga conflict of rule* (konflik peranan). Seiring dengan adanya konflik antara kedudukan – kedudukan, maka ada juga konflik peran dan bahkan pemisahan antara individu-individu dengan peran yang sesungguhnya harus dilaksanakan. *Role distance* terjadi apabila si individu merasakan dirinya tertekan, karena merasa dirinya tidak sesuai untuk melaksanakan perannya yang diberikan masyarakat kepada dirinya. Sehingga tidak dapat melaksanakan perannya dengan sempurna bahkan menyembunyikan diri.













